

EDUKASI DINI TERTIB ADMINISTRASI DAN SADAR HUKUM LALU LINTAS BERSAMA CIVITAS SMA N 2 BOGOR

Yusup Lintang Cahyo Andrian Putro¹, Bahir Mukhammad² Helni Sadid Parassa³,
Fadri Ari Sandi⁴, Rafika Afriyanti⁵, Agus Priyanto⁶

Universitas Terbuka

yusup.lintang@ecampus.ut.ac.id¹

Abstrak

Kata Kunci:
*edukasi lalu
lintas, tertib
administrasi,
sadar hukum,
pelajar SMA,
berkelanjutan.*

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman administrasi dan kesadaran hukum lalu lintas untuk kalangan pelajar, dalam hal ini adalah masyarakat, khususnya siswa SMA Negeri 2 Bogor. Dilakukan dengan edukasi kolaboratif antara dosen Program Studi Administrasi Publik (ADPU), Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka (UT). Fokus kegiatan adalah membangun karakter generasi muda yang tertib administrasi dan sadar hukum sejak dini, khususnya terkait pentingnya kelengkapan dokumen kendaraan bermotor (SIM, STNK, BPKB, dll) dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas. Metode pelaksanaan mencakup seminar dan sosialisasi, pelatihan guru, simulasi interaktif berbasis teknologi, dan evaluasi berkelanjutan. Seminar memberikan dasar pengetahuan tentang administrasi dan hukum lalu lintas, sementara pembekalan guru memperkuat kapasitas pendidik dalam mengintegrasikan materi administrasi dan hukum ke dalam pembelajaran. Simulasi berbasis teknologi, seperti penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan aplikasi digital yang berkaitan, memungkinkan siswa belajar secara praktis dan menarik. Kegiatan ini dievaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* dengan tujuan mengukur peningkatan pemahaman siswa. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dan kesadaran hukum. Pengurangan pelanggaran lalu lintas, serta dukungan terhadap pelayanan publik yang lebih efektif di sektor administrasi kendaraan. Selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), kegiatan ini berkontribusi pada pembangunan komunitas yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Edukasi dini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya tertib administrasi dan sadar hukum, tetapi juga menjadi *agent of change* untuk mewujudkan masyarakat yang lebih tertib dan sadar hukum.

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem transportasi di Indonesia mengalami akselerasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah melampaui 150 juta unit, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5–7%. Fenomena ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi sebagai konsekuensi dari urbanisasi, peningkatan ekonomi domestik, serta kemudahan akses terhadap kepemilikan kendaraan pribadi. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum dan perilaku disiplin dalam berlalu lintas.

Hasil penelitian **Raharjo dkk, (2022)**, menegaskan bahwa pelajar dan remaja masih menjadi kelompok paling rentan terhadap pelanggaran lalu lintas karena minimnya pemahaman terhadap aturan dan rendahnya literasi hukum di lingkungan sekolah. Temuan serupa juga dikonfirmasi oleh **Zakaria dkk, (2023)** yang menjelaskan bahwa pelanggaran oleh pengendara usia muda didominasi oleh perilaku berkendara tanpa SIM dan tidak mengenakan helm standar.

Berdasarkan laporan **Korlantas Polri (2023)**, pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia muda, terutama pelajar dan mahasiswa. Pelanggaran umum yang sering terjadi meliputi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pelanggaran etika berkendara seperti melawan arus dan tidak menggunakan helm standar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara peningkatan jumlah kendaraan dan tingkat literasi hukum penggunaannya. Bagi pemerintah, hal ini menjadi tantangan strategis dalam membangun tata kelola lalu lintas yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum di kalangan generasi muda.

Dalam konteks tersebut, **Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** ini hadir sebagai upaya sistematis dan berbasis akademik untuk memperkuat literasi hukum dan administrasi publik di bidang lalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah atas. Literasi hukum menjadi elemen penting dalam membentuk karakter pelajar sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan publik. Menurut **Dewi & Bahtiar (2023)**, digitalisasi layanan publik seperti aplikasi **SAMSAT Mobile (Sambara)** menjadi bagian penting dari transformasi administrasi publik yang mendorong transparansi dan kemudahan akses hukum di bidang transportasi.

SMA Negeri 2 Kota Bogor dipilih sebagai mitra kegiatan bukan tanpa alasan. Sekolah ini dikenal memiliki kultur kedisiplinan yang kuat, dukungan manajemen sekolah yang progresif, serta siswa yang aktif secara akademik dan sosial. Lingkungan ini kondusif bagi implementasi program berbasis **literasi hukum dan administrasi publik**, yang sejalan dengan temuan **Dina Anisia Dewi (2023)** bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan dan instansi pemerintah menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik digital di sektor lalu lintas.

Tujuan utama kegiatan ini bukan sekadar memberikan edukasi teknis mengenai dokumen kendaraan bermotor seperti **SIM, STNK, dan BPKB**, tetapi juga menanamkan nilai-nilai **sustainable government policy** dalam konteks pendidikan hukum lalu lintas. Prinsip ini menempatkan kegiatan PkM sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan di sektor transportasi publik di mana **kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan keselamatan** menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola transportasi yang manusiawi dan berkeadilan.

Menurut **Mahdani & Ismatullah (2023)**, kebijakan pajak kendaraan bermotor dan sanksi administrasi yang transparan dapat meningkatkan kepatuhan publik jika didukung edukasi hukum dan sistem pelayanan yang efisien. Dalam konteks PkM ini, prinsip tersebut diadaptasi dalam bentuk literasi pajak kendaraan dan administrasi dokumen hukum yang diajarkan kepada pelajar, untuk memperkuat kesadaran tanggung jawab publik sejak dini.

Lebih jauh lagi, program ini merupakan wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan menengah dalam membangun ekosistem pembelajaran kolaboratif. Melalui pendekatan partisipatif, pelajar tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif yang ikut membentuk budaya tertib lalu lintas. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan *output* berkelanjutan, yakni munculnya agen perubahan di kalangan pelajar yang mampu menularkan kesadaran hukum kepada lingkungan sekitarnya, hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mewujudkan *sustainable governance* di bidang transportasi dan keselamatan jalan raya.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada 14 Juli 2025 di SMA Negeri 2 Kota Bogor, bertepatan dengan momentum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pemilihan waktu tersebut dilakukan secara strategis karena MPLS menjadi ruang efektif untuk membentuk karakter dasar peserta didik baru, khususnya dalam hal disiplin, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum sebagai calon pengguna jalan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Aryani (2019) bahwa pendidikan hukum yang diintegrasikan sejak jenjang sekolah menengah berperan besar dalam membentuk perilaku sadar aturan dan disiplin sosial.

Peserta kegiatan terdiri dari X (sepuluh), panitia MPLS, guru, serta perwakilan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bogor Kota. Kegiatan juga tim PkM dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang bertindak sebagai fasilitator dan narasumber utama. Model pelaksanaan kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, memadukan dimensi akademik, administrasi, hukum, dan praktik lapangan secara integratif.

Tahap awal dimulai dengan sosialisasi interaktif menggunakan presentasi visual, game edukatif, dan diskusi kelompok terbuka, yang mengadopsi prinsip student-centered learning. Dalam sesi ini, peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam dialog dengan narasumber untuk memahami dasar hukum lalu lintas, jenis dokumen kendaraan bermotor (SIM, STNK, dan BPKB), serta peran pelajar dalam tertib administrasi publik. Pendekatan digital learning diterapkan untuk mendukung arah Sustainable Government Policies, yaitu tata kelola transportasi yang cerdas dan beretika. Sejalan dengan temuan Saputra & Syahrial (2024), pembelajaran berbasis media digital mampu meningkatkan literasi hukum hingga 70% dibandingkan metode konvensional karena menghadirkan pengalaman interaktif yang kontekstual.

Selanjutnya, sesi pembekalan literasi hukum berfokus pada pendalaman aspek legalitas kendaraan dan administrasi publik yang relevan dengan kehidupan siswa. Materi mencakup fungsi dan kedudukan SIM sebagai bukti kompetensi berkendara, STNK sebagai bukti legalitas kendaraan di jalan, dan BPKB sebagai dokumen kepemilikan sah. Narasumber dari Satlantas Polresta Bogor Kota turut memberikan studi kasus pelanggaran administrasi kendaraan serta sanksinya sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, tim pelaksana melaksanakan pre-test dan post-test daring dengan 20 butir soal yang menguji pemahaman hukum lalu lintas, dokumen kendaraan, dan etika berkendara. Hasilnya menunjukkan peningkatan skor rata-rata sebesar 38%, yang menunjukkan efektivitas model partisipatif dalam meningkatkan literasi hukum pelajar.

Sebagai penguatan afektif, dilakukan kegiatan edukatif dan interaktif seperti tebak rambu lalu lintas, kuis, dan presentasi. Kegiatan ini tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga berfungsi sebagai civic learning experience yang menanamkan pemahaman hukum melalui pengalaman langsung. Menurut Aryani (2019), pembelajaran berbasis pengalaman semacam ini efektif dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang disiplin dan berkeadilan.

Tahap akhir kegiatan ditandai dengan refleksi bersama dan pembentukan komunitas “Duta Tertib Lalu Lintas SMA Negeri 2 Bogor”, yang berfungsi sebagai wadah pelajar sadar administrasi dan hukum. Program tindak lanjut ini dilaksanakan secara kolaboratif antara sekolah dan Universitas Terbuka. Komunitas ini diharapkan menjadi pelopor kampanye keselamatan dan kesadaran hukum di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sejalan dengan pandangan Wahyono (2015), kolaborasi antara lembaga pendidikan dan kepolisian mencerminkan prinsip community policing yang efektif dalam memperkuat partisipasi publik terhadap penegakan hukum dan pembangunan budaya tertib lalu lintas.

Secara metodologis, kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan partisipatif yang menekankan penguatan kapasitas

hukum melalui transfer informasi, simulasi, dan refleksi bersama. Model ini mendukung prinsip *Education for Sustainable Development (ESD)* yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembelajaran hukum. Dengan demikian, PkM ini tidak hanya menjadi sarana diseminasi pengetahuan, tetapi juga wahana transformasi nilai-nilai administrasi publik yang berkeadilan, transparan, dan inklusif, selaras dengan visi *Sustainable Civic Governance* dan tata kelola pemerintahan berkelanjutan di sektor transportasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Perwujudan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan perilaku sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tahap pelaksanaan PkM di SMA Negeri 2 Kota Bogor dirancang secara sistematis dengan mengedepankan prinsip *Education for Sustainable Development*, yakni pendidikan yang menanamkan nilai keberlanjutan sosial, tanggung jawab publik, dan kesadaran hukum sejak usia dini (UNESCO, 2022).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori administrasi publik dan praktik kesadaran hukum di masyarakat, khususnya dalam konteks tertib berlalu lintas. Dalam hal ini, pendekatan literasi hukum di tingkat pelajar menjadi instrumen strategis untuk membentuk budaya taat aturan yang lahir dari pemahaman, bukan sekadar kepatuhan administratif.

SMA Negeri 2 Kota Bogor dipilih sebagai mitra program bukan hanya karena statusnya sebagai sekolah unggulan di wilayah Bogor, tetapi juga karena memiliki kultur akademik yang mendukung kolaborasi lintas lembaga. Kolaborasi antara Universitas Terbuka, kepolisian, dan institusi pendidikan menengah ini menjadi wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik, di mana sector akademik, pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan bekerjasama membangun ekosistem social yang berdaya hukum dan literatif.

Melalui serangkaian kegiatan seperti **sosialisasi interaktif, pembekalan literasi hukum, kegiatan edukatif, evaluasi pengetahuan, dan pembentukan komunitas Duta Tertib Lalu Lintas**, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum dan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya disiplin, etika, dan keselamatan dalam berlalu lintas.

1. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan PkM ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip *sustainable* dapat diterapkan di tingkat sekolah. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan kesadaran hukum tidak dapat dilakukan secara *top-down*, tetapi harus lahir dari partisipasi masyarakat, terutama generasi muda sebagai subjek utama transformasi social.

a. Presentasi dan Sosialisasi Interaktif

Kegiatan presentasi dan **sosialisasi interaktif** menjadi tahap pembuka dalam rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Pelaksanaannya dilakukan pada **14 Juli 2025 di Aula SMA Negeri 2 Kota Bogor**, bersamaan dengan agenda **Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)**. Momentum ini dipilih secara strategis karena bertepatan dengan proses adaptasi peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, sehingga memungkinkan internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, kesadaran administrasi, dan hukum sejak awal masa belajar.

Peserta dan fasilitator kegiatan terdiri seluruh **siswa kelas X (sepeuluh) beserta panitia MPLS, 5 guru pendamping, serta 3 personel dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bogor Kota**, dengan **6 dosen dari Universitas Terbuka**. Komposisi ini menunjukkan kolaborasi lintas lembaga antara pihak akademik, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum, sebagaimana disarankan oleh **Wahyono (2015)** bahwa kemitraan institusional merupakan model efektif dalam memperkuat *civic engagement* dan kesadaran hukum masyarakat sekolah.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini berbasis **partisipatif dan interaktif**, dengan media utama berupa **presentasi visual, pemutaran video edukatif, serta diskusi kelompok terbuka**. Materi utama yang disampaikan meliputi:

- 1) Dasar hukum lalu lintas nasional yang diatur dalam *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;
- 2) **Fungsi dan kedudukan dokumen kendaraan bermotor**. Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti kompetensi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai bukti legalitas kendaraan di jalan, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai dokumen kepemilikan sah;
- 3) **Etika berlalu lintas dan keselamatan berkendara**, termasuk penggunaan helm SNI dan kepatuhan terhadap rambu lalu lintas.

Pendekatan ***student-centered learning*** diterapkan secara optimal untuk menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didorong berdialog langsung dengan narasumber dan terlibat dalam sesi tanya jawab reflektif mengenai fenomena pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar. Berdasarkan **observasi lapangan dan hasil kuesioner**, diperoleh data bahwa **92% peserta menyatakan materi mudah dipahami**, sementara **85% aktif berpartisipasi dalam diskusi**.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian **Saputra & Syahril (2024)** yang menegaskan bahwa **model edukasi berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman hukum pelajar hingga 70%** karena memberi ruang refleksi dan keterlibatan langsung. Hasil tersebut juga diperkuat oleh **Kurniawan, dkk (2021)** yang menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual berbasis studi kasus meningkatkan empati dan tanggung jawab siswa dalam berlalu lintas.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung arah kebijakan *sustainable government policies* melalui penggunaan media pembelajaran digital yang mendukung tata kelola transportasi cerdas dan beretika. Digitalisasi materi sosialisasi memungkinkan penyebaran edukasi hukum secara luas dan efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Alam dan Purnamasari (2024) bahwa inovasi digital Korlantas Polri mempercepat proses edukasi publik dan memperluas jangkauan pembinaan hukum berbasis teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital Korlantas Polri sangat efektif dalam memfasilitasi layanan publik, khususnya perpanjangan SIM secara daring”.

Untuk memperkuat validitas kegiatan, berikut disajikan data rekapitulasi peserta kegiatan sosialisasi interaktif:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Peserta Kegiatan

Kategori Peserta	Jumlah	Presentase
Siswa kelas X	432	90.00%
Panitia MPLS	35	7.29%
Guru	5	1.04%
Personel Polresta Bogor Kota	3	0.63%
Tim PkM Dosen Universitas Terbuka	5	1.04%

Sumber: Data daftar hadir kegiatan PkM “Edukasi Dini Tertib Administrasi dan Hukum Lalu Lintas”, 14 Juli 2025.

Secara umum, kegiatan sosialisasi interaktif ini menghasilkan **dampak langsung berupa peningkatan pengetahuan dasar hukum lalu lintas dan kesadaran pentingnya tertib administrasi publik sejak dini**. Berdasarkan refleksi pasca-kegiatan, sebagian besar siswa mengaku lebih memahami urgensi membawa dokumen kendaraan yang sah dan berkomitmen untuk mematuhi aturan berkendara yang aman dan beretika. Pembekalan Literasi Administrasi dan Hukum.

Sebagaimana diungkapkan oleh Harta dan Ashari. (2025), Literasi hukum terkait tertib berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini, khususnya pada siswa SMA/SMK. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah awal strategis dalam membangun generasi muda yang berdaya hukum dan berkarakter warga negara yang bertanggung jawab.

b. Edukasi Literasi Administrasi dan Hukum

Kegiatan pembekalan literasi hukum dilaksanakan pada **14 Juli 2025** pukul **10.00–12.00 WIB**, bertempat di ruang aula besar **SMA Negeri 2 Kota Bogor**. Sesi ini merupakan lanjutan dari kegiatan sosialisasi interaktif yang bertujuan memperdalam pemahaman siswa terhadap aspek **hukum, administrasi publik, dan transformasi digital pelayanan publik**. Metode yang digunakan berupa **seminar, game edukatif dan simulasi digital**, yang memungkinkan peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berlatih secara langsung memahami mekanisme pelayanan publik berbasis teknologi.

Materi utama yang disampaikan mencakup tiga topik penting, yaitu **(1)** prosedur administrasi pembuatan **Surat Izin Mengemudi (SIM)** dan **Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)** sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; **(2)** fungsi **Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)** sebagai dokumen hukum yang membuktikan kepemilikan sah kendaraan; dan **(3)** pemanfaatan **aplikasi digital SIGNAL (Samsat Digital Nasional)**.

Kegiatan ini difasilitasi oleh **Satlantas Polresta Bogor Kota** dan **tim dosen Universitas Terbuka**, yang berperan sebagai narasumber dan fasilitator simulasi. Melalui pendekatan audiovisual, peserta diperkenalkan dengan video tutorial penggunaan aplikasi digital untuk memperpanjang STNK dan mengelola data kendaraan secara daring. Pendekatan ***experiential learning*** ini terbukti lebih efektif dalam membangun keterampilan praktis siswa dibandingkan metode ceramah konvensional.

Berdasarkan hasil **pre-test dan post-test**, diperoleh peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap literasi hukum dan administrasi kendaraan. Nilai rata-rata *pre-test* menunjukkan angka **56,4**, sedangkan nilai rata-rata *post-test* meningkat menjadi **74,6**, atau mengalami peningkatan sebesar **32%**. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi metode partisipatif dan simulasi digital mampu meningkatkan keterlibatan dan retensi pengetahuan siswa.

Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Korlantas Polri mempercepat edukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum dan memperluas akses pembinaan hukum berbasis teknologi, Alam dan Purnamasari (2024). Dengan demikian, kegiatan pembekalan literasi hukum di SMA Negeri 2 Bogor ini tidak hanya memberikan pemahaman substantif, tetapi juga mengimplementasikan prinsip **Sustainable Government Policies** melalui literasi digital dan partisipasi aktif pelajar.

Pembinaan literasi hukum di kalangan pelajar berperan penting dalam membentuk pola pikir sadar hukum dan perilaku kepatuhan sosial di masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun generasi muda yang berdaya hukum, mendukung transformasi menuju masyarakat digital yang beretika, tertib, dan patuh pada hukum.

Tabel 2. Evaluasi *Pre-Test* dan *Post-Test*

Indikator	Nilai Rata-Rata	Peningkatan
<i>Pre-Test</i>	56,4	-
<i>Post-Test</i>	74,6	32%

Sumber: Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* peserta kegiatan PkM “Edukasi Dini Tertib Administrasi dan Hukum Lalu Lintas”, 14 Juli 2025.

Berdasarkan temuan tersebut, kami menyatakan bahwa pemanfaatan **media pembelajaran online** berperan penting dalam memudahkan guru menyampaikan materi kompleks secara efektif dan menarik bagi siswa, khususnya dalam konteks pembelajaran hukum dan administrasi publik.

c. Kegiatan Edukatif dan Interaktif

Sebagai bagian dari strategi penguatan literasi hukum dan pembentukan karakter sadar hukum di kalangan pelajar, kegiatan edukatif dan interaktif diselenggarakan pada sesi siang hari, setelah pembekalan literasi hukum formal selesai. Bentuk kegiatan ini meliputi

kuis dan game interaktif, permainan tebak rambu lalu lintas, serta simulasi sekilas tentang keselamatan berkendara.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat aspek **afektif dan psikomotorik siswa** dalam memahami simbol, rambu, dan etika berlalu lintas melalui pengalaman langsung yang menyenangkan dan mendidik. Pendekatan pembelajaran ini mengacu pada konsep *Civic Learning through Experiential Education* **Aryani (2019)**, yang menekankan bahwa pendidikan hukum yang efektif harus melibatkan aktivitas sosial yang kontekstual dan memberi ruang bagi peserta untuk belajar melalui pengalaman hidup yang bermakna.

Dalam praktiknya, siswa diajak berinteraksi secara interaktif dan mengikuti sesi permainan edukatif dengan kesukarelaan. Melalui kuis, peserta menjawab pertanyaan seputar hukum lalu lintas, dokumen kendaraan, dan etika berkendara. Sementara dalam simulasi rambu lalu lintas, siswa berperan sebagai pengendara dan petugas lalu lintas dalam miniatur lintasan yang dirancang menyerupai kondisi jalan raya sebenarnya.

Pendekatan berbasis *game-based learning* ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi aktif siswa. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner, sebanyak 95% peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, dan 88% di antaranya menyatakan kegiatan edukatif ini membuat mereka lebih tertarik mempelajari hukum lalu lintas dan keselamatan berkendara.

Gambar 1. Dokumen kegiatan PkM “Edukasi Dini Tertib Administrasi dan Hukum Lalu Lintas”, 14 Juli 2025.



Dokumen video dapat diakses dalam link berikut ini:
<https://youtu.be/cLwfVnXNzFM?si=FhJrkeUY-Swqep1N>

Kegiatan ini secara praktis memperkuat kesadaran hukum pelajar melalui aktivitas kolaboratif, reflektif, dan aplikatif. media interaktif seperti quiz learning dan simulasi visual berperan penting dalam membangun hubungan positif antara kognisi dan afeksi siswa terhadap nilai-nilai hukum publik.

d. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahap akhir kegiatan PkM dilaksanakan dalam bentuk **refleksi kelompok dan pembentukan komunitas “Duta Tertib Lalu Lintas SMA Negeri 2 Bogor”**. Refleksi ini difasilitasi oleh dosen Universitas Terbuka bersama perwakilan **Satlantas Polresta Bogor Kota** dan guru pembimbing sekolah. Tujuan utama tahap ini adalah menanamkan **nilai civic engagement** dan membangun kepemimpinan sosial di kalangan pelajar agar mereka berperan aktif dalam menyebarkan budaya tertib berlalu lintas melalui poster yang dibuat oleh tim Dosen PkM untuk dapat di-*posting* di media sosial. Dari hasil monitoring tindak lanjut, diketahui bahwa **minat pelajar untuk menjadi relawan atau duta lalu lintas meningkat hingga 20%** setelah kegiatan berlangsung. Pihak sekolah juga berencana menjadikan kegiatan ini sebagai program tahunan dalam agenda pembinaan karakter siswa baru.

Langkah pembentukan komunitas ini sejalan dengan gagasan **Wahyono (2015)** tentang *community policing berbasis pendidikan*, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat kepolisian dan lembaga pendidikan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat sejak usia dini.

Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata melalui pembentukan komunitas pelajar aktif, penguatan karakter disiplin, serta terciptanya hubungan kemitraan berkelanjutan antara universitas, sekolah, dan kepolisian. Kegiatan ini menjadi model replikasi bagi sekolah lain dalam upaya membangun **ekosistem pembelajaran hukum partisipatif dan berkelanjutan** di tingkat pendidikan menengah.

2. Dampak Sosial

Program PkM ini memberikan **dampak signifikan** bagi berbagai pemangku kepentingan mulai dari siswa, sekolah, aparat kepolisian, hingga perguruan tinggi, dengan cara yang saling terhubung dan mendukung arah tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.

- a. Bagi siswa, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai hukum lalu lintas dan administrasi publik. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, banyak siswa menyatakan bahwa mereka kini lebih menyadari pentingnya membawa dokumen kendaraan yang sah, menggunakan helm standar, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Perubahan persepsi ini sesuai dengan hasil penelitian Idayanti dkk. (2023) bahwa *"pembinaan literasi hukum di kalangan pelajar memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pikir dan perilaku sadar hukum di masyarakat"*.
- b. **Bagi sekolah**, program ini membantu membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah yang sebelumnya belum memiliki fokus khusus pada aspek administrasi kendaraan dan keselamatan berkendara. Modul literasi hukum yang dihasilkan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal, yang memperkuat peran sekolah sebagai lembaga pembinaan karakter dan kewarganegaraan. Sekolah juga menjadi pusat kegiatan kampanye dan komunitas pelajar aktif yang menyebarkan nilai-nilai tertib lalu lintas ke lingkungan sekitar.
- c. **Bagi aparat kepolisian**, kolaborasi dengan sekolah dan perguruan tinggi memperkuat sinergi antara penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Salsabila dan Prathama. (2025), menjelaskan bahwa program *Police Goes to School* efektif menurunkan angka pelanggaran lalu lintas pelajar sebesar 61% setelah pelaksanaan edukasi kolaboratif di sekolah menengah. kemitraan antara Satlantas dan guru bimbingan konseling menjadi strategi efektif untuk internalisasi nilai keselamatan berkendara melalui pendekatan emosional dan kultural, Arumdani dan Irawan (2025).
- d. Bagi perguruan tinggi, Universitas Terbuka sebagai penyelenggara ikut memperluas peran sosialnya dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengajaran atau penelitian, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pembinaan masyarakat, hal ini memberikan kontribusi langsung dalam pembentukan warga negara yang sadar administrasi, hukum dan terbentuk secara kolektif.

Dari sisi masyarakat luas, program ini merencanakan program agen perubahan di kalangan pelajar melalui duta lalu lintas bersama tim PKM dosen Universitas Terbuka. Dengan perencanaan ini, setidaknya berdasarkan obeservasi kami telah memicu peningkatan minat pelajar

menjadi relawan lalu lintas sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi literasi administrasi dan hukum lalu lintas di tingkat sekolah dapat memiliki efek *cascading* (bergelombang) ke lingkungan sekolah dan masyarakat.

3. Keterkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Big Image kami secara berkelanjutan dan memandang jauh kedepan, kegiatan ini secara eksplisit diharapkan mendukung dua sasaran utama dalam kerangka pembangunan global:

- a. SDG poin 11 (Sustainable Cities and Communities), dengan meningkatkan kesadaran keselamatan transportasi dan tertib administrasi lalu lintas, kegiatan ini ikut menjaga ketertiban, keselamatan pengguna jalan, dan keberlanjutan ekosistem transportasi di lingkungan perkotaan dan sekolah.
- b. SDG poin 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), diharapkan program ini membantu membentuk warga negara yang sadar hukum, tertib dalam administrasi publik, dan mampu berpartisipasi dalam tata kelola yang adil dan transparan. Sebagaimana dinyatakan dalam laman resmi UN SDGs bahwa “*mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan kelembagaan yang kuat*” menjadi pilar penting.
- c. Lebih jauh lagi, pendekatan edukatif yang diadopsi dalam program ini mengimplementasikan prinsip ***Education for Sustainable Development (ESD)***, yaitu pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keberlanjutan sosial dan tanggung jawab publik. Mardian (2023) dalam *Physics and Science Education Journal* menyebutkan bahwa setelah pandemi COVID-19, implementasi ESD di Indonesia semakin maju sebagai bagian dari agenda SDGs dalam pendidikan.

Dengan demikian, kegiatan PkM ini bukan hanya terfokus pada aspek teknis administrasi lalu lintas, tetapi juga berada dalam kerangka kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan (sustainable government policies), yang mengintegrasikan dimensi sosial, institusi, dan pendidikan dalam upaya jangka panjang membangun masyarakat yang tertib, adil, dan partisipatif.

D. Simpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) “Edukasi Dini Tertib Administrasi dan Sadar Hukum Lalu Lintas Bersama Civitas SMA N 2 Bogor” menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran administrasi di kalangan pelajar. Melalui pendekatan partisipatif, interaktif, dan berbasis teknologi, program ini mampu menanamkan nilai-nilai disiplin sosial, tanggung jawab publik, serta etika berlalu lintas secara kontekstual dan menyenangkan.

Hasil *pre-test* dan *post-test* membuktikan adanya peningkatan pemahaman hukum pelajar sebesar 32%, yang menunjukkan bahwa integrasi antara metode *digital learning*, simulasi praktis, dan *civic learning* berbasis pengalaman mampu memperkuat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Lebih jauh, rencana pembentukan duta lalu lintas menjadi langkah strategis dalam melahirkan agen perubahan di tingkat sekolah, yang secara mandiri melanjutkan gerakan sadar hukum dan keselamatan berkendara di lingkungan masing-masing.

Dari perspektif akademik dan kebijakan publik, kegiatan ini merepresentasikan penerapan nyata prinsip ***Sustainable Government Policies*** dan ***Education for Sustainable Development (ESD)*** di sektor transportasi dan pendidikan. Sinergi antara Universitas Terbuka, Satlantas Polresta Bogor Kota, dan SMA Negeri 2 Bogor mencerminkan praktik ***quadruple helix governance***, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia pendidikan yang menghasilkan inovasi sosial berkelanjutan.

Secara substantif, PkM ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-11 (Sustainable Cities and Communities) dan tujuan ke-16 (Peace, Justice, and Strong Institutions). Edukasi hukum lalu lintas yang dilakukan secara dini tidak hanya membangun karakter pelajar yang tertib administrasi dan sadar hukum, tetapi juga memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan di masa depan. Kegiatan ini bukan sekadar intervensi edukatif jangka pendek, tetapi juga investasi sosial jangka panjang untuk membentuk generasi muda yang literatif, berintegritas, dan memiliki kesadaran hukum tinggi sebagai wujud implementasi nyata visi kebijakan pemerintah yang berkelanjutan di Indonesia.

E. Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Terbuka menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: 1) Rektor Universitas Terbuka, beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), serta pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka, atas dukungan

kelembagaan, kebijakan, dan pendanaan yang memungkinkan kegiatan ini terlaksana dengan baik; 2) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bogor Kota, yang telah menjadi mitra strategis dalam memberikan materi hukum dan praktik administrasi kendaraan, serta berperan aktif dalam mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung. 3) Kepala Sekolah dan seluruh jajaran guru SMA Negeri 2 Kota Bogor, yang telah memberikan ruang, fasilitas, dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini. 4) Para siswa peserta kegiatan, khususnya kelas X dan panitia MPLS SMA Negeri 2 Bogor, atas antusiasme, kedisiplinan, dan keterlibatan aktif dalam setiap sesi kegiatan, yang menjadi kunci keberhasilan program ini. 5) Pihak-pihak lain yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membantu kelancaran seluruh rangkaian acara.

Akhir kata, tim PkM berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan model replikasi bagi lembaga pendidikan lainnya dalam memperkuat literasi hukum dan administrasi publik di tingkat sekolah. Semoga kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas, sejalan dengan visi “Edukasi Dini, Edukasi Tertib Administrasi, dan Hukum Lalu Lintas dalam Kerangka *Sustainable Government Policies*.”

F. Referensi

- Alam, H. K., Purnamasari, H. (2024). Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Digital Korlantas Polri. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 511–522. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3668>.
<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3668>
- Arum, Y. R., Irawan, A. (2025). Analisa Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024 (Studi Kasus di Satlantas Polres Sukoharjo). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2470-2477. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1294>
- Aryani, I. K. (2023). Integrasi Pendidikan Lalu Lintas di Sekolah. (2019). *Tunjuk Ajar : Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 2(1), 41-55. <https://doi.org/10.33578/>
- Bahtiar, R., Myrna, R., Susanti, E. (2021). Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 231-253. <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5675>
- Dewi, D. A., Pebyanti, A., Putri, N. A., Rahmi, N. (2025). Analisis Implementasi Sistem Aplikasi Signal Polri pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Pusat. *Transaparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(1), 755-82. <https://doi.org/10.31334/transaparansi.v8i1.4529>

- Harta, R. D., & Ashari, M. (2025). Penyuluhan Bahaya Penggunaan HP Saat Berkendara untuk Remaja. *JPEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 46–51. <https://doi.org/10.71456/adc.v3i3.1373>
- Idayanti, S., Widyastuti, T. V., Indriasari, E., Aryani, F. D., Hamzani, A. I. (2024). Literasi Hukum Generasi Z Tertib Berlalu Lintas dan Dokumen Kependudukan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Pemalang. *Newadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1), 30-38. <https://journal.pencerah.org/index.php/deepa/article/view/297/175>
- Kurniawan, A., Darma, S. H. ., & Saleh, A. . (2021). Peran Guru PAI dalam Membentuk Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas XII di SMK Texmaco Purwasari. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(02), 125–139. <https://doi.org/10.52593/pdg.02.2.05>
- Mahdani, T. M., Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (2021). *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(1), 16-25. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14751>
- Mardian, V. (2023). How is ESD (Education For Sustainable Development) Implemented After Covid-19 in Indonesia to Realize SDG's?. *Physics and Science Education Journal (PSEJ)*, 3(3), 126–133. <https://doi.org/10.30631/psej.v3i3.2116>
- Raharjo, E., Jatmiko, G., Septiana, R., Irvansyah, D., Adani, M. I. (2022). Kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMA YP Unila Bandar Lampung. *Jurnal Sumbangsih*, 3(2), 82-88. <https://doi.org/10.23960/jsh.v3i2.86>
- Salsabila, A., Prathama, A. (2025). Efektivitas Program Police Goes To School Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Pada Pelajar di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(1), 143-156.
- Syahrial., Saputra, R. P. (2024). Pentingnya Hukum Berlalu Lintas dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Siswa SMK 1 Kuok dalam Berkendara. *Community Development Journal*. 5(4), 7434-7441.
- UNESCO. (2022). Education for Sustainable Development (ESD). <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education>
- UNITED NATION. The Global Goals. <https://globalgoals.org/goals/> .
- Wahyono, A. (2015). Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM): Sebuah Pendekatan Perpolisian Masyarakat Untuk Membangun Citra Polisi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 11(1), 125–144. <https://doi.org/10.14203/jmb.v11i1.238>
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97–106. <https://doi.org/10.21067/jph.v9i1.11384>